



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tantangan Demokrasi sebagai Suatu Sistem yang Dinamis di Era Digital: Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Proses Politik Nasional

Rasji¹, Antonio Bravo^{2*}, Baharuddin Jusuf Habibie Hasta³, Matthew Alexander Nainggolan⁴

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, antonio.205230099@stu.untar.ac.id

³Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, baharuddin.205230322@stu.untar.ac.id

⁴Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, matthew.205220331@stu.untar.ac.id

*Corresponding Author: antonio.205230099@stu.untar.ac.id²

Abstract: *Democracy as a system of government is constantly evolving along with social, political, and technological changes that occur in society. In Indonesia, democracy is not static, but rather dynamic and adaptive to various changes in the era, including in the digital era marked by advances in information and communication technology. This study aims to examine and analyze the challenges faced by Indonesian democracy in the context of digitalization, with a focus on the influence of social media on the national political process. Social media has become a new public space that allows people to express their opinions, discuss, and actively participate in political and state issues. This phenomenon creates great opportunities for expanding political participation, especially among the younger generation, but also presents serious challenges such as disinformation, polarization, and manipulation of public opinion through political buzzers and digital algorithms. The research findings show that although social media can strengthen democratic values by opening access to information and political participation, its uncontrolled use also has the potential to damage the democratic order by spreading hate speech, hoaxes, and forming an "echo chamber" that hinders dialogue between views. This study concludes that Indonesian democracy will continue to survive and develop if it is able to manage the dynamics of social media wisely and inclusively as an integral part of a dynamic democratic system.*

Keywords: *democracy, digital era, social media, political participation, disinformation, digital public space.*

Abstrak: Demokrasi sebagai sistem pemerintahan senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat. Di Indonesia, demokrasi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap berbagai perubahan zaman, termasuk dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia dalam konteks digitalisasi, dengan fokus pada pengaruh media sosial terhadap proses politik nasional. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang

memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berdiskusi, serta berpartisipasi secara aktif dalam isu-isu politik dan kenegaraan. Fenomena ini menciptakan peluang besar bagi perluasan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda, namun juga menghadirkan tantangan serius seperti disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik melalui buzzer politik dan algoritma digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dengan membuka akses terhadap informasi dan partisipasi politik, namun penggunaannya yang tidak terkontrol juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dengan menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan membentuk “ruang gema” yang menghambat dialog antar pandangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia akan terus bertahan dan berkembang jika mampu mengelola dinamika media sosial secara bijak dan inklusif sebagai bagian integral dari sistem demokrasi yang dinamis.

Kata Kunci: demokrasi, era digital, media sosial, partisipasi politik, disinformasi, ruang publik digital.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Demokrasi, demokrasi adalah suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara (Sulisworo, 2012). Mengutip dari buku karangan Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan, secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya (Mahfud MD, 2006). Kata demokrasi diambil dari bahasa Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan pada abad ke 5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat (Sulisworo, 2012).

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini terutama di bidang teknologi dan komunikasi yang sangat pesat, sistem demokrasi di Indonesia turut memperlihatkan bahwa sistem ini sebagai sistem yang dinamis. Dinamis berarti bahwa sistem ini tidak bersifat kaku melainkan mengikuti kemana arah dan tujuan perkembangan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Namun, dinamika demokrasi tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam era digital saat ini. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap proses demokrasi adalah perkembangan media sosial. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan memperoleh informasi secara instan. Dalam konteks politik nasional, media sosial memiliki peran ganda: di satu sisi, ia dapat memperkuat demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat; di sisi lain, ia juga dapat menjadi alat penyebaran misinformasi dan polarisasi politik yang mengancam stabilitas demokrasi itu sendiri (Robert A. Dahl, 1989).

Kemajuan teknologi komunikasi telah menciptakan sisi lain politik yang lebih terbuka dan interaktif. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, aktor politik dapat berkomunikasi langsung dengan publik tanpa perantara media konvensional. Hal ini mengubah pola komunikasi politik, di mana informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas, memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses politik (Castells, 2012). Namun, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa penggunaan media sosial dalam demokrasi tetap berada dalam koridor yang sehat dan tidak justru menjadi alat manipulasi opini publik (Sunstein, 2017).

Melalui analisis ini diharapkan penelitian kami dapat memberikan kontribusi yang dapat memberikan pandangan baru terhadap sistem demokrasi di Indonesia bahwa demokrasi di Indonesia adalah sistem yang dinamis dengan berbagai tantangannya terutama di bidang teknologi dan komunikasi. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat jurnal kami dengan judul **“Tantangan Demokrasi sebagai Suatu Sistem yang Dinamis di Era Digital: Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Proses Politik Nasional”**.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Tim Peneliti adalah penelitian Hukum bersifat Deskriptif Normatif. Dengan mencari dan mengumpulkan data dari sumber kepustakaan serta Undang-Undang yang relevan dengan kasus penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep demokrasi sebagai sistem yang dinamis, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hukum dan ilmu politik di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dari buku dan jurnal akademik yang membahas demokrasi, media sosial, dan dampaknya terhadap proses politik di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan konsep-konsep hukum dan politik dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan hukum melalui interpretasi terhadap sumber-sumber hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Demokrasi sebagai Sistem yang Dinamis dan Penerapannya di Indonesia di Era Globalisasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman dan kondisi sosial politik suatu negara. Menurut Moh. Mahfud MD, demokrasi dipilih sebagai sistem dalam bermasyarakat dan bernegara karena hampir semua negara di dunia menjadikannya sebagai asas fundamental serta memberikan arah bagi masyarakat dalam mengelola negara sebagai organisasi tertinggi (Mahfud MD, 2006). Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis (Madjid, 2004). Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai dan demokrasi (Sukron, 2011). Di Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai perubahan dan adaptasi sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

Demokrasi di Indonesia bersifat dinamis karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama di era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan komunikasi. Menurut Ramlan Surbakti, sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara tidak bersifat statis, tetapi selalu mengalami evolusi sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia, di mana sistem demokrasi yang diterapkan terus berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perubahan global (Surbakti, 2010). Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideologi yang

terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*), ideologi ini memiliki konsep (*presept*) sehingga cenderung ketinggalan zaman.

Era globalisasi membawa tantangan dan peluang bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi agar tetap relevan. Di era digital saat ini, demokrasi mengalami pergeseran dalam pola partisipasi politik masyarakat, yang semakin banyak dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya (Budiarjo, 2008). Selain itu, penerapan demokrasi di Indonesia juga didukung oleh prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat dan hak politik warga negara. Seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, demokrasi di Indonesia bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia berakar pada asas kedaulatan rakyat yang mengutamakan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2005).

Selain itu, dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan hak-hak politiknya, termasuk melalui media sosial sebagai sarana modern dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan, sistem demokrasi di Indonesia merupakan sistem yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Era globalisasi dan perkembangan teknologi membawa dampak besar terhadap cara demokrasi dijalankan, baik dalam hal partisipasi politik masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika demokrasi sangat penting agar sistem ini dapat terus berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Pengaruh Media Sosial dalam Membentuk Wacana dan Partisipasi Politik di Tingkat Nasional

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik di Indonesia. Media sosial, sebagai salah satu produk revolusi digital, kini menjadi instrumen penting yang mempengaruhi dinamika politik nasional. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube tidak lagi sekadar sarana interaksi sosial, tetapi telah bertransformasi menjadi ruang publik digital yang memfasilitasi pertukaran gagasan politik, mobilisasi massa, dan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. (Lim, Merlyna. 2017, hal 78)

Media sosial telah mengubah pola komunikasi politik dari model satu arah menjadi interaktif dan partisipatif. Jika sebelumnya informasi politik didominasi oleh media konvensional dengan gatekeeper yang ketat, kini setiap warga dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi politik. Fenomena ini menciptakan demokratisasi wacana politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Nugroho, media sosial telah menciptakan "ruang publik baru" di Indonesia yang memungkinkan warga untuk mendiskusikan isu-isu politik tanpa hambatan struktural seperti pada media konvensional. (Nugroho, Yanuar. 2020. hal 78)

Dalam konteks pembentukan wacana politik, media sosial berperan sebagai arena pertarungan narasi. Berbagai aktor politik, mulai dari politisi, partai politik, hingga kelompok kepentingan, berlomba-lomba membangun narasi yang menguntungkan dan memengaruhi persepsi publik. Proses ini sering kali melibatkan penggunaan buzzer politik dan pasukan siber yang secara sistematis menyebarkan narasi tertentu untuk membentuk opini publik. (Prakoso, Johannes Adi. 2022. hal. 112-115.) Praktik ini menjadi semakin menonjol dalam kontestasi politik nasional, terutama selama periode Pemilihan Umum.

Aspek yang tidak kalah penting adalah kemampuan media sosial dalam memobilisasi partisipasi politik warga negara. Lesmana mengidentifikasi bahwa platform digital telah menciptakan bentuk-bentuk partisipasi politik baru yang lebih inklusif dan beragam (Lesmana, Tjipta. 2021. hal 67). Mulai dari petisi daring, kampanye digital, hingga gerakan hashtag, media sosial menawarkan jalur partisipasi alternatif yang lebih mudah diakses oleh berbagai segmen masyarakat, terutama generasi muda yang sering disebut sebagai "pemilih milenial" dan "Generasi Z".

Penelitian Tapsell menunjukkan bahwa selama Pemilu 2019, media sosial menjadi medan pertempuran utama yang mempengaruhi preferensi pemilih. (Tapsell, Ross, 2019 hal. 203-205). Kampanye digital yang intensif, perang hashtag, dan penyebaran konten politik viral mampu mempengaruhi wacana politik nasional dan, pada akhirnya, perilaku pemilih. Fenomena ini semakin mengkonfirmasi pentingnya "literasi digital politik" sebagai komponen penting dalam mewujudkan partisipasi yang berkualitas dalam demokrasi Indonesia.

Namun, pengaruh media sosial dalam politik nasional juga membawa tantangan serius. Polarisasi politik yang tajam, penyebaran disinformasi dan misinformasi, serta munculnya "kamar gema" (echo chamber) adalah beberapa dampak negatif yang perlu diwaspadai (Hamid, Ahmad. 2021, hal 34) Jafar Suryomenggolo menyoroti bagaimana algoritma media sosial cenderung mengelompokkan pengguna berdasarkan kesamaan pandangan politik, sehingga menciptakan gelembung informasi yang memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mempersulit dialog lintas perspektif. (Suryomenggolo, Jafar. 2022, hal hal. 89-92)

Mengatasi tantangan ini, berbagai inisiatif telah muncul di Indonesia. Mulai dari gerakan literasi digital yang diprakarsai oleh masyarakat sipil, regulasi platform media sosial oleh pemerintah, hingga upaya fact-checking kolaboratif. Kurniawan menilai bahwa kolaborasi multi-pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi positif media sosial untuk demokrasi Indonesia sekaligus meminimalisir dampak negatifnya. (Kurniawan, Hasan. 2023. hal 156)

Ke depan, pengaruh media sosial dalam wacana dan partisipasi politik nasional diprediksi akan semakin meningkat. Hal ini didorong oleh penetrasi internet yang terus meluas, transformasi demografis pemilih yang didominasi generasi digital native, serta inovasi teknologi yang berkelanjutan. Aziz memprediksi bahwa platform media sosial akan semakin terintegrasi dengan sistem politik formal, mengubah tidak hanya cara kampanye dilakukan tetapi juga bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dievaluasi. (Aziz, Abdul. 2023. hal. 201-203)

Media sosial telah mengubah secara fundamental lanskap politik Indonesia dengan menciptakan ruang baru bagi wacana dan partisipasi politik. Pengaruhnya mencakup transformasi komunikasi politik, pembentukan narasi publik, mobilisasi partisipasi warga, hingga polarisasi masyarakat. Mengoptimalkan potensi positif media sosial untuk penguatan demokrasi sambil meminimalisir dampak negatifnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan respons komprehensif dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. (Budiman, Arief. 2022, hal. 178)

KESIMPULAN

Demokrasi di Indonesia merupakan sistem yang terus berevolusi dan beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi. Sebagai sistem yang dinamis, demokrasi Indonesia tidak hanya merespons perubahan zaman, tetapi juga harus mampu mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam era digital. Penerapan demokrasi di era globalisasi memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif warga negara tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kebebasan berpendapat dan hak politik setiap individu.

Di sisi lain, perkembangan media sosial sebagai produk revolusi digital telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dengan isu-isu politik dan pemerintahan. Media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan terjadinya pertukaran wacana secara cepat dan masif. Hal ini membawa dua sisi mata uang: di satu sisi memperluas partisipasi dan kesadaran politik, khususnya di kalangan generasi muda; namun di sisi lain, juga berpotensi menimbulkan disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik yang dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam memperkuat atau bahkan melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat demokrasi Indonesia di era digital harus disertai dengan peningkatan literasi digital, penguatan regulasi terhadap ekosistem media sosial, serta mendorong kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan pelaku teknologi. Hanya dengan langkah-langkah yang komprehensif dan kolaboratif, demokrasi Indonesia dapat tetap relevan, sehat, dan berkelanjutan di tengah gelombang transformasi digital yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Aziz, Abdul. *Masa Depan Demokrasi Digital Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2023.
- Budiman, Arief. *Media Sosial dan Tantangan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: IRE Press, 2022.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi, Negara, dan Masyarakat: Pemikiran Politik Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Castells, Manuel. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press, 2012.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Hamid, Ahmad. *Gelembung Filter: Polarisasi dan Tribalisasi Politik di Media Sosial Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka, 2021.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah Dan HAM, Fundamentalisme Dan Antikorupsi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kurniawan, Hasan. *Membangun Ekosistem Digital yang Demokratis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023.
- Lesmana, Tjipta. *Revolusi Politik Digital: Partisipasi Politik Era Media Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Lim, Merlyna. *Kebebasan Bermedia Sosial: Politik, Budaya dan Teknologi Informasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- MaHFud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Nugroho, Yanuar. *Media Sosial dan Transformasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Prakoso, Johannes Adi. *Buzzer Politik: Kekuatan Baru dalam Lanskap Politik Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif. *Bahan Ajar: Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*. 2012.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sunstein, Cass R. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press, 2017.

Suryomenggolo, Jafar. *Algoritma dan Kekuasaan: Politik Digital di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 2022.

Tapsell, Ross. *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Diterjemahkan oleh Lesmana. Jakarta: Marjin Kiri, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.